

## **BAB II**

### **SAUDI VISION 2030 DALAM NEGARA ARAB SAUDI**

Perubahan-perubahan yang terjadi pada Arab Saudi merupakan suatu hal yang baru bagi negara tersebut. Maka dari itu, Saudi Vision 2030, yang cukup membawa perubahan terutama dalam kebijakan di Arab Saudi, juga dianggap sebagai hal baru baik bagi pemerintahan Arab Saudi maupun masyarakatnya. Bab ini akan menjelaskan tentang Negara Arab Saudi mulai dari masa pemerintahan Raja Salman dan dilanjutkan dengan detail dari pelaksanaan Saudi Vision 2030 yang kemudian dicetuskan oleh Pangeran Mohammed bin Salman, setelah diangkat sebagai Putra Mahkota.

#### **2.1 Negara Arab Saudi pada Pemerintahan Raja Salman**

Negara Arab Saudi merupakan negara yang berbentuk Monarki Absolut, sebagaimana telah dijelaskan dalam Bab I, dimana raja berperan sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara yang juga merupakan pemegang kekuasaan tertinggi di Arab Saudi. Negara Arab Saudi merupakan negara berbasis agama Islam sehingga pemerintahan yang ada di negara tersebut cukup berbeda dengan negara-negara lain. Dalam web resmi Saudi Embassy ([saudiembassy.net](http://saudiembassy.net)), dijelaskan sejarah mengenai raja-raja yang pernah memimpin Arab Saudi yang sebelumnya belum dikenal oleh dunia internasional. Sejak Raja Abdulaziz Al-Saud mendirikan kerajaan Arab Saudi modern pada tahun 1932, terjadi transformasi cukup besar pada Arab Saudi yang pada awalnya hanya negara gurun menjadi negara modern dan dapat bersaing dalam dunia internasional. Di tahun tersebut, Raja Abdulaziz Al-Saud menamai negara tersebut Kerajaan Arab Saudi, sebuah negara islam dengan bahasa Arab sebagai bahasa nasionalnya dan Al-Quran sebagai konstitusi negara tersebut. Pada masa pemerintahannya, Raja Abdulaziz Al-Saud mulai membangun infrastruktur, membangun jalan dan sistem komunikasi, serta meningkatkan pendidikan, kesehatan, dan pertanian Arab Saudi.

Ia juga dikenal oleh pemimpin negara lain karena integritas dan kejujurannya dalam berdiplomasi. Kemudian Raja Saud menggantikan posisi ayahnya sebagai Raja Arab Saudi pada tahun 1953 dan kemudian melanjutkan pembangunan negara tersebut. Ia juga membentuk Dewan Menteri dan Kementrian Kesehatan, Pendidikan, dan Perdagangan. Selain itu, Raja Saud juga mendirikan sekolah-sekolah dan juga institut pendidikan tinggi, Universitas Raja Saud. Sebagai Raja Arab Saudi, ia juga dikenal secara global karena kunjungannya ke Amerika Serikat yang merupakan kunjungan pertama yang dilakukan oleh Raja Arab Saudi ke negara tersebut. Setelah Raja Saud, jabatan tersebut turun kepada Raja Faisal bin Abdulaziz, seorang inovator yang visioner dan sangat menghormati tradisi. Ia mendirikan sekolah umum pertama untuk anak perempuan serta mencetuskan rancangan pembangunan ekonomi dan sosial yang akan mengubah infrastruktur Arab Saudi, terutama dalam industri. Jabatan raja pada Arab Saudi terus menurun kepada keluarga kerajaan dan digantikan ketika raja sebelumnya wafat. Hingga akhirnya pada tahun 2015, tepatnya pada 23 Januari 2015, Raja Salman diangkat sebagai Raja Arab Saudi setelah Raja Abdullah wafat pada tahun tersebut (CNN Indonesia, 2015).

Raja Salman lahir pada 31 Desember 1935 di Riyadh, Arab Saudi. Ia mulai memasuki ranah pemerintahan pada tahun 1954 ketika ia diangkat menjadi waki gubernur Arab Saudi. Kemudian pada tahun berikutnya ia diangkat sebagai gubernur Arab Saudi dan menduduki jabatan tersebut selama 5 tahun. Pada tahun 2011, ia kemudian ditunjuk sebagai Menteri Pertahanan Arab Saudi, dimana ia bertanggung jawab dalam mengamankan pembelian senjata bernilai miliaran yang digunakan Arab Saudi untuk meningkatkan hubungan dengan kekuatan Barat.

Semenjak tahun 1956, Raja Salman sering menjadi ketua dari berbagai komite kemanusiaan yang memberikan bantuan kepada korban bencana dan juga mendapatkan penghargaan termasuk penghargaan dari negara-negara lain seperti; Bahrain, Bosnia, Palestina, dan beberapa negara lain. Selain penghargaan dari negara tersebut, Raja Salman juga mendapatkan penghargaan atas bantuan kemanusiaan yang ia berikan dari *United Nations* (Saudi Embassy, 2015). Raja Salman telah menjabat sebagai gubernur Arab Saudi selama 48 tahun (1963-2011) dan selama ia berada pada posisi tersebut itulah, ia telah melakukan banyak

kunjungan dan bantuan kepada negara-negara lain. Salah satunya, Raja Salman ditunjuk untuk mengarahkan *Saudi High Commission* untuk memberikan bantuan kepada Bosnia dan Herzegovina. Melalui komisi tersebut, Raja Salman mengumpulkan bantuan dari keluarga kerajaan dan juga menjadi pengawas komisi tersebut sampai dengan penutupannya pada tahun 2011 (Foreign Policy, 2015). Selain itu pada tahun 2017, tepatnya pada tanggal 1 Maret 2017, Raja Salman juga sempat mengunjungi Indonesia yang kemudian disaksikan penandatanganan 11 nota kesepahaman antar bidang. Beberapa kesepakatan yang tercakup adalah peningkatan hubungan kerjasama hubungan luar negeri, kesehatan, kebudayaan, perdagangan, dan pendidikan (News Detik, 2017). Kunjungan ini dianggap sebagai kunjungan ‘bersejarah’ karena kunjungan dari Arab Saudi ini baru dilaksanakan kembali setelah kunjungan Raja Faisal bin Abdulaziz Al Saud pada 1970. Kunjungan tersebut dianggap cukup berhasil memperkuat hubungan bilateral antara kedua negara tersebut dan meningkatkan kerjasama perekonomian (Mata Mata Politik, 2017).

Sebelumnya, Raja Salman sudah menjabat sebagai Putra Mahkota setelah menjabat sebagai Wakil Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan Arab Saudi. 2 tahun setelah Raja Salman memberikan gelar Putra Mahkota kepada keponakannya, Mohammed bin Nayef, ia akhirnya memberikan jabatan tersebut kepada putranya sendiri yakni Mohammed bin Salman yang juga menjabat sebagai Menteri Pertahanan Arab Saudi pada saat itu.

Pangeran Mohammad bin Salman lahir pada 31 Agustus 1985 dan merupakan putra Raja Salman yang paling tua dari istri ketiganya, Fahda bint Falah bin Sultan Hathleen al-Ajmi. Sebelum ia menjabat sebagai Putra Mahkota, namanya sama sekali belum pernah terdengar. Bahkan beberapa biografi yang menuliskan mengenai Pangeran Mohammed bin Salman tidak dapat menuliskan apa yang dilakukan oleh Pangeran Mohammed bin Salman pada umur 20 tahun hingga akhirnya ia melanjutkan pendidikannya di Universitas King Saud dan lulus dengan gelar sarjana hukum pada tahun 2007. Hal ini dikarenakan sebelumnya Pangeran Mohammed bin Salman tidak terlihat ‘lebih’ daripada saudara-saudaranya. Ia bahkan tidak merintis pendidikannya di luar negeri seperti kebanyakan saudaranya di kerajaan (The Washington Post, 2020). Ia hanya

mendapatkan pendidikan di kerajaan dan ia juga tidak fasih dalam berbahasa inggris.

Ia sempat menduduki jabatan sebagai Menteri Pertahanan sebelum akhirnya menjadi Putra Mahkota. Semenjak ia memegang jabatan tersebut ia telah melakukan beberapa hal yang kemudian mendapatkan kecaman, beberapa di antaranya menyebabkan bencana kemanusiaan pada Yaman, memulai perselisihan diplomatik dengan Qatar, dan menindas suara-suara yang tidak setuju atau bertentangan dengan apa yang ia kehendaki. Bahkan ia sempat terlibat pada kasus dibunuhnya kritikus terkemuka pemerintah, Jamal Khashoggi, pada tahun 2018 yang merusak reputasi internasionalnya (BBC, 2020). Pada 2015, Arab Saudi melakukan intervensi perang saudara Yaman dan kemudian melancarkan lebih dari 1.600 serangan udara yang menargetkan pemberontak Houthi. Tidak hanya melakukan serangan pada target yang telah ditentukan, tetapi serangan udara ini juga menewaskan dan menelantarkan warga sipil dan menghancurkan rumah sakit, sekolah, dan infrastruktur lainnya hingga PBB menggambarkan Yaman sebagai krisis kemanusiaan terburuk di dunia (Aljazeera, 2020). Intervensi tersebut kemudian dibela oleh Pangeran Mohammed bin Salman yang menyampaikan kepada TIME pada 2018, bahwa “dalam setiap operasi militer kesalahan pasti terjadi, tentunya kesalahan yang dilakukan oleh Arab Saudi merupakan kesalahan yang tidak disengaja”.

Tetapi dilihat dari sisi lain, Pangeran Mohammed bin Salman mendapatkan pengakuan dan pujian dari pemimpin negara barat setelah adanya beberapa reformasi yang diberikan dan dapat dibilang merupakan suatu perubahan besar kepada negara yang konservatif, seperti mencabut larangan perempuan mengemudi serta melakukan diversifikasi ekonomi. (BBC, 2020). Saudi Vision 2030 merupakan rencana jangka panjang yang disampaikan dengan sangat percaya diri. Dalam menjalankan rencana jangka panjangnya ini, Pangeran Mohammed bin Salman sadar bahwa ia memerlukan dana yang sangat besar, terutama dana dan juga dukungan dari negara asing. Maka dari itu, penting bagi Arab Saudi untuk mendapatkan dukungan-dukungan tersebut terutama dukungan dari negara barat yang pada saat ini memiliki *'power'* dalam dunia internasional.

## 2.2 Saudi Vision 2030

Arab Saudi memiliki beberapa kebijakan yang mengatur dan membatasi hak perempuan bahkan dalam bidang pendidikan. Sehingga banyak pihak-pihak yang mengecam hal tersebut terutama organisasi internasional yang mendukung hak asasi manusia. Dalam laporan Human Rights Watch, pada tahun 2014, Arab Saudi masih banyak melakukan pelanggaran hak asasi manusia dan salah satunya merupakan hak-hak wanita yang sangat dibatasi dan diatur (HRW, 2004). Hingga pada tahun 2005, ketika Arab Saudi diperintah oleh Raja Abdullah, muncul beberapa perubahan yang pertama dalam bidang pendidikan bagi perempuan. Pada awalnya Raja Abdullah menerapkan program beasiswa luar negeri dan untuk pertama kalinya Arab Saudi memberikan kesempatan yang sama kepada perempuan. Tetapi dalam pelaksanaannya, perempuan harus mendapatkan izin dari keluarganya dan juga ditemani oleh wali laki-laki selama masa studi mereka. Bahkan dalam pelaksanaannya, bisa saja perempuan berumur 30 tahun pergi belajar ke Amerika Serikat dari beasiswa tersebut tetapi ditemani oleh wali laki-lakinya yang masih berumur 18 tahun (Almansour, 2012). Meskipun begitu, secara bertahap, perempuan dapat memperoleh pendidikan yang setara dengan laki-laki. Kemudian Raja Abdullah juga berusaha untuk memberikan lapangan pekerjaan yang lebih luas untuk perempuan Arab Saudi. Meskipun dalam pelaksanaannya pemerintah harus 'melawan' ulama yang menentang hal tersebut dan masih memiliki asumsi bahwa perempuan yang berpendidikan sekalipun tetap ingin bekerja sebagai ibu rumah tangga dan tidak meninggalkan rumah (The Guardian, 2012). Pada 2009, Raja Abdullah menunjuk Noura Al-Fayez sebagai perempuan Saudi pertama yang menduduki posisi di Kementrian Arab Saudi. Noura Al-Fayez menjabat sebagai Wakil Menteri Pendidikan Arab Saudi dan berperan untuk meningkatkan pendidikan perempuan Arab Saudi (IHS, 2009). Meskipun terdapat progress terhadap hak perempuan Arab Saudi, secara keseluruhan dilihat dari sudut pandang hak asasi manusia, upaya pemerintah dalam meningkatkan partisipasi perempuan ini masih cenderung ambigu, gagal mencapai target, atau terhalang oleh kekuatan negara yang konservatif (Drury, 2015). Sehingga kebebasan perempuan untuk memilih pendidikan maupun pekerjaan masih terbatas.

Kemudian Raja Abdullah digantikan oleh Raja Salman yang ternyata masih melanjutkan perubahan yang sempat dibawa Raja Abdullah, salah satunya terkait hak-hak perempuan di Arab Saudi. Raja Salman mencabut beberapa batasan perempuan salah satunya memberikan suara atau hak untuk memilih meskipun hanya dalam pemilihan dewan kota. Kemudian di tahun 2017, Raja Salman memerintahkan agar perempuan dapat mengakses layanan pemerintah seperti pendidikan maupun kesehatan tanpa perlu izin dari wali mereka (News Week, 2017). Hingga kemudian reformasi tersebut dilanjutkan oleh Pangeran Mohammed bin Salman sebagai Putra Mahkota. Ia secara terang-terangan mengatakan bahwa *‘women are “absolutely” equal’* karena pada dasarnya semua manusia memiliki hak yang setara terlepas dari gender mereka (CBS News, 2018). Pangeran Mohammed bin Salman secara bertahap terus berusaha meningkatkan hak-hak perempuan Arab Saudi yang juga merupakan salah satu rencana dalam Saudi Vision 2030.

Pada 2016, Pangeran Mohammed bin Salman memperkenalkan rencana reformasinya yang bernama Saudi Vision 2030 yang berisi *long-term goals* yang ingin dicapai Negara Arab Saudi. Pangeran Mohammed bin Salman mengatakan bahwa rencana tersebut dibuat berdasarkan *‘unique strengths and capabilities’* dari Arab Saudi sendiri. Salah satu reformasi sosial Saudi Vision 2030 di tahun pertamanya adalah membatasi kekuasaan The Committee for the Promotion of Virtue and the Prevention of Vice<sup>1</sup> yang sering disebut sebagai *‘religious police’* oleh negara barat (Al Arabiya, 2019). Saudi Vision 2030 ini merupakan ‘paket’ kebijakan sosial dan ekonomi yang dirancang untuk membebaskan Arab Saudi dari ketergantungan negara pada ekspor minyak dan menciptakan pembangunan ekonomi berkelanjutan serta masyarakat yang sejahtera. Terdapat 3 pilar utama dalam rancangan Saudi Vision 2030 ini; *a vibrant society, a thriving economy, dan an ambitious nation* (Vision 2030 n.d.).

---

<sup>1</sup> The Committee for the Promotion of Virtue and the Prevention of Vice merupakan otoritas agama pemerintahan Arab Saudi yang bertugas untuk memantau perilaku sosial dan menegakkan ketaatan pada hukum moral islam, termasuk pakaian dan pemisahan gender.

Ketiga pilar tersebut memiliki tujuan masing-masing. Pertama, *a vibrant society* yang berfokus pada kesejahteraan masyarakat. Terdapat beberapa poin-poin utama dalam tujuan ini;

1. *A vibrant society with fulfilling lives*, yang bertujuan untuk menaikkan reputasi tiga kota di Arab Saudi dan masuk dalam peringkat teratas kota-kota di dunia, meningkatkan pengeluaran masyarakat pada kegiatan yang melibatkan budaya dan hiburan dalam Arab Saudi dari 2,9% menjadi 6%, serta meningkatkan rasio individu yang berolahraga setidaknya sekali seminggu dari 13% menjadi 40%.
2. *A vibrant society with strong roots*”, beberapa tujuannya meliputi peningkatan kapasitas pengunjung umroh dari 8 juta mencapai 30 juta setiap tahunnya dan menambah jumlah situs warisan Arab Saudi yang terdaftar dalam UNESCO.
3. *A vibrant society with strong foundations*”, bertujuan meningkatkan posisi Arab Saudi dalam *Social Capital Index* dari 26 ke posisi 10 serta meningkatkan angka harapan hidup sampai dengan umur 80 tahun.

Arab Saudi memiliki keuntungan secara wilayah geografis, sosial budaya, demografis, dan perekonomian yang dapat memajukan negara tersebut dalam dunia internasional. Maka dari itu, dengan Saudi Vision 2030, diharapkan keuntungan yang dimiliki Arab Saudi tersebut dapat dikembangkan dan dimanfaatkan dengan maksimal untuk memajukan negara. Arab Saudi merupakan negara Islam yang memiliki tempat-tempat suci untuk beribadah bagi umat muslim. Di negara tersebut juga terdapat Mekah, tempat lahirnya agama Islam, dan juga Madinah, tempat pertama kalinya muncul masyarakat Islam. Maka dari itu, Arab Saudi merupakan tempat yang penting bagi umat Islam terutama untuk beribadah. Agar dapat memaksimalkan ibadah bagi umat muslim di Arab Saudi, dilakukan ekspansi pada tempat-tempat ibadah dan juga bandara untuk meningkatkan kapasitas pengunjung serta peningkatan kualitas layanan kepada jamaah Umroh. Selain itu, pemerintah juga berencana untuk membangun transportasi umum, seperti kereta, yang dapat memudahkan akses masyarakat asing yang datang untuk beribadah.

Arab Saudi juga merupakan salah satu negara teraman di dunia dengan melewati 5 indikator yang telah ditetapkan oleh *Global Competitiveness Report* 2019 dan melewati 5 anggota tetap Dewan Keamanan PBB (Arab News, 2020). Maka dari itu pemerintah Arab Saudi berusaha untuk mempertahankan angka keamanan tersebut dengan meningkatkan usaha mulai dari penanganan obat-obatan terlarang sampai upaya mengurangi angka kecelakaan lalu lintas dan meminimalisir akibat dari kecelakaan tersebut. Saat ini Arab Saudi telah memiliki perkembangan yang signifikan disertai dengan pembangunan infrastruktur yang stabil. Maka dari itu, pemerintah juga berupaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Arab Saudi dengan menjaga kualitas air, listrik, transportasi umum, dan jalan. Selain hal ini dilakukan untuk masyarakatnya, pemerintah Arab Saudi juga melakukan upaya tersebut untuk menjaga kualitas lingkungan negaranya. Beberapa upaya lain yang dilakukan sebagai bentuk usaha untuk menjaga lingkungan negara mereka adalah dengan meningkatkan efisiensi pengolahan limbah, mengurangi berbagai jenis polusi, dan mempromosikan penggunaan sumber daya air secara optimal dengan memanfaatkan air yang dapat diolah dan dapat diperbarui. Dalam hal ini sektor swasta maupun pemerintah ikut berpartisipasi menjalankan upaya-upaya ini.

Setelah beberapa hal tersebut, Arab Saudi juga ingin meningkatkan standar kualitas layanan perawatan kesehatan dengan memberikan tanggung jawab bidang kesehatan ini kepada perusahaan publik maupun sektor swasta. Hal ini kemudian akan memberikan peluang bagi pemerintah untuk berfokus pada peran legislatif, regulasi, dan pengawasan. hak-pihak yang bertanggung jawab akan kesehatan ini juga akan lebih maksimal dalam memberikan perawatan kesehatan.

Tujuan kedua dari Saudi Vision 2030 adalah *a thriving economy* yang lebih berfokus pada pembangunan berkelanjutan negara dan dibukanya peluang bagi investor asing. Tujuan ini meliputi (Vision 2030 n.d.):

1. *A thriving economy rewarding opportunities*, beberapa tujuannya seperti mengurangi angka pengangguran, meningkatkan kontribusi SME (*Small-Medium Enterprises*) pada GDP negara sampai dengan 35%, dan juga meningkatkan partisipasi perempuan dalam ranah kerja hingga 30%.



2. *A thriving economy investing for the long-term*, bertujuan untuk mencapai peringkat 15 besar dalam peringkat negara dengan perekonomian terbesar, meningkatkan lokalisasi sektor minyak dan gas mencapai 75%, dan meningkatkan asset Dana Investasi Publik.
3. *A thriving economy open for business*, memiliki tujuan meningkatkan posisi Arab Saudi dalam 10 besar *Global Competitiveness Index*, meningkatkan Investasi Asing Langsung menjadi tingkat internasional dengan angka GDP sebesar 5,7%, dan meningkatkan kontribusi sektor swasta dalam GDP menjadi 65%.
4. *A thriving economy leveraging its unique position*, bertujuan meningkatkan posisi global Arab Saudi dalam Indeks Kinerja Logistik dan memastikan bahwa Arab Saudi merupakan pemimpin regional, serta meningkatkan ekspor non-migas dalam GDP mencapai 50%.

Untuk meningkatkan pendidikan yang akan berguna dalam perekonomian, pemerintah juga menargetkan sistem '*learning for working*' dimana pelajar, baik perempuan maupun laki-laki, akan diberikan pendidikan dan juga menyediakan pelatihan yang akan berguna dalam pekerjaan nantinya. Pemerintah juga akan memastikan bahwa hasil dari pendidikan yang diberikan kepada pelajar di Arab Saudi sesuai dengan kebutuhan pasar nantinya. *Small and Medium-sized Enterprises* (SMEs) juga memiliki peran penting dalam pertumbuhan ekonomi. Dengan adanya SMEs ini, dapat terciptanya lapangan kerja baru, mendukung adanya inovasi, dan meningkatkan ekspor negara. Meskipun saat ini belum banyak berkontribusi dalam GDP negara, tetapi pemerintah akan mendukung perkembangan SMEs dengan memberikan regulasi atau peraturan yang tidak ketat, memberikan akses yang mudah dalam hal pendanaan, dan mudahnya kerjasama dengan kemitraan internasional. Tidak hanya anak muda yang akan mendapatkan kesempatan dalam berbisnis, tetapi penyandang disabilitas juga akan mendapatkan kesempatan yang sama dan mendapatkan fasilitas dan peralatan yang dibutuhkan untuk berbisnis.

Meskipun pada saat ini minyak dan gas merupakan pilar terpenting dalam perekonomiannya, Arab Saudi mulai memperluas investasi pada sektor-sektor

lainnya. Pada sektor hiburan dan pariwisata akan dibangun tempat wisata dengan standar internasional tertinggi, dibukanya visa dengan tujuan berlibur untuk masuk ke Arab Saudi, dan akan dikembangkan situs-situs sejarah dan warisan Arab Saudi. Di bidang teknologi, Arab Saudi akan meningkatkan investasi negara mereka dalam ekonomi digital. Dan pada bidang-bidang lainnya. Selain itu, meskipun sektor swasta memiliki peran penting dalam perekonomian, tetapi pada saat ini sektor swasta berkontribusi kurang dari 40% kepada GDP negara. Untuk meningkatkan kontribusi tersebut, Arab Saudi akan membuka peluang investasi baru, memberikan fasilitas investasi, mendukung adanya inovasi, dan menghilangkan hambatan yang mempengaruhi sektor swasta yang berperan dalam pembangunan. Sektor swasta juga akan mengambil peran yang saat ini masih dipegang oleh sektor publik, seperti kesehatan dan pendidikan. Peraturan dan kebijakan terkait investor asing juga akan diperbarui dimana saat ini sudah terbuka jalan bagi investor asing untuk masuk ke Arab Saudi.

Kemudian Arab Saudi akan melokalkan industri pertahanan yang diharapkan dapat mendorong sektor industri seperti peralatan industri, komunikasi, dan teknologi informasi, yang juga akan membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakatnya. Meskipun Arab Saudi merupakan negara yang berada pada peringkat ketiga dalam negara yang menghabiskan dana terbanyak untuk bidang militer, tetapi hanya 2% dari dana tersebut digunakan untuk membeli peralatan militer di Arab Saudi sendiri. Hal ini dikarenakan sektor industri pertahanan nasional sebelumnya dibatasi hanya pada tujuh perusahaan dan dua pusat penelitian. Maka dari itu, pemerintah akan memperluas industri pertahanan negara. Sampai dengan saat ini, Arab Saudi telah mengembangkan beberapa industri kecil yang menyediakan suku cadang dan amunisi dasar, dan masih akan terus dikembangkan industri-industri yang lebih kompleks seperti pesawat tempur atau pesawat militer.

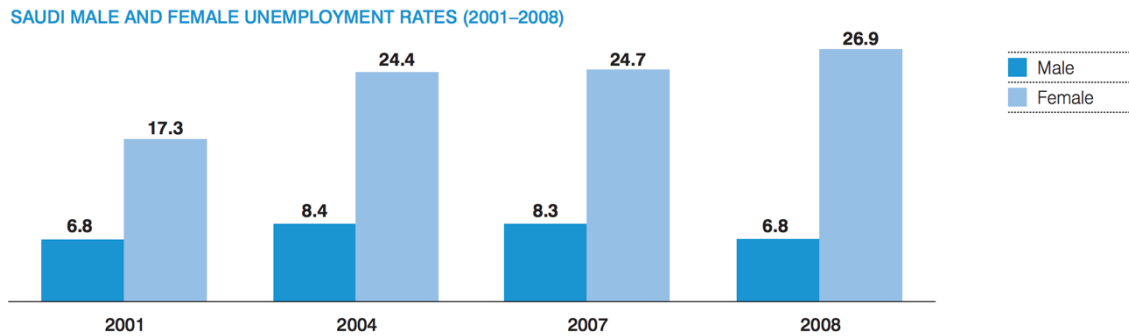
Negara Arab Saudi berada tepat pada lintas jalur perdagangan internasional yang berada di antara 3 kontinen: Asia, Eropa, dan Afrika. Arab Saudi juga memiliki hubungan ekonomi yang baik dengan Dewan Kerjasama Teluk dan negara-negara Arab lainnya dengan posisinya yang berada di Timur Tengah. Posisi geografis ini dapat dianggap sebagai posisi strategis terutama bagi Arab Saudi

sendiri. Sehingga, pemerintah bekerjasama dengan sektor swasta maupun investor asing untuk membangun infrastruktur yang dapat meningkatkan dan menghubungkan serta menciptakan kerjasama yang baik bagi negara-negara yang terlibat. Pemerintah juga akan meningkatkan peraturan yang telah ada dan meningkatkan kapasitas operator yang terlibat, pada transportasi udara dan laut, agar dapat tercipta hubungan perdagangan untuk jangka waktu yang panjang. Hal ini dapat memperkuat posisi Arab Saudi sebagai gerbang logistik pada ketiga benua yang melewati jalur perdagangan tersebut. Dan Arab Saudi juga akan membangun jaringan jalan raya dan kereta api, serta mempersatukan bea cukai, guna memperkuat dan memperluas interkoneksi dan integrasi ekonomi dengan negara-negara Dewan Kerjasama Teluk lainnya. Selain itu, tidak menutup kemungkinan Arab Saudi akan bekerjasama dengan negara lain salah satunya adanya projek pembangunan jalur transpor darat dengan Afrika melalui Mesir.

Untuk industri-industri nasional, pemerintah akan mendukung penuh baik dalam memasarkan industri tersebut ke luar negeri maupun mengeksport produknya. Sebelumnya, pemerintah lebih memprioritaskan perusahaan besar nasional saja. Tetapi pemerintah saat ini juga memberikan peluang bagian industri-industri lain untuk berkembang sehingga dapat bersaing secara global.

Salah satu isu terpenting dalam perekonomian Arab Saudi ini adalah partisipasi perempuan dalam angkatan kerja masih sangat dibatasi dikarenakan adanya budaya patriarki yang kuat. Akibat adanya pembatasan partisipasi perempuan tersebut, angka pengangguran perempuan Arab Saudi menjadi sangat tinggi apabila dibandingkan dengan laki-laki, seperti yang telah tercantum pada data dibawah ini:

**Gambar 2.1**  
**Perbandingan Angka Pengangguran Perempuan dan Laki-laki**  
**(2001-2008)**



**Source: Saudi Arabian Monetary Agency (SAMA) Agustus 2008**

Pada tahun 1992, partisipasi perempuan dalam angkatan kerja sempat meningkat dari 5,4% menjadi 14,4% dengan diperbolehkannya perempuan bekerja dalam bidang pendidikan. Pada saat ini perempuan lebih mungkin dipekerjakan dalam sektor publik meskipun tidak menutup kemungkinan juga perempuan dapat bekerja pada sektor swasta (AlMunajjed, 2010). Meskipun seiring berjalannya waktu akses pendidikan bagi perempuan Arab Saudi semakin meningkat dan diberi kelonggaran, partisipasi perempuan dalam bekerja masih dibatasi sehingga banyak perempuan Arab Saudi yang berpendidikan tidak memiliki pekerjaan dan menjadi pengangguran setelah lulus (Sidani, 2005).

Sampai dengan tahun 2008, seperti yang telah tercantum pada data diatas, pengangguran perempuan Arab Saudi masih sangat tinggi bahkan melebihi setengah dari angka pengangguran laki-laki. Kemudian seiring berjalannya waktu, satu persatu hak perempuan semakin bertambah bahkan tidak hanya dalam ranah bekerja. Dimulai pada tahun 2011, Raja Abdullah mengizinkan perempuan untuk menjabat pada dewan penasihat pemerintah, kemudian perempuan juga memiliki hak pilih dan diikuti dengan diperbolehkannya perempuan ikut dalam olimpiade pada tahun 2012. Kemudian pada tahun 2017, pada masa pemerintahannya, Raja Salman bahkan telah memudahkan perempuan untuk mendapatkan akses pendidikan hingga kesehatan tanpa persetujuan wali laki-laki, serta kebebasan untuk bekerja di sektor publik maupun swasta. Hal ini dikarenakan adanya protes

dari komunitas internasional terkait dipilihnya Arab Saudi sebagai anggota Komisi Wanita pada PBB, padahal Arab Saudi sendiri masih memiliki kesenjangan yang sangat terlihat antara perempuan dan laki-laki. Maka dari itu, Arab Saudi berusaha mulai menyetarakan masyarakat perempuan dan laki-laki Arab Saudi seperti negara-negara lain, meskipun belum sepenuhnya memberikan kebebasan dalam segala hal (CNN, 2017).

Meskipun terdapat beberapa kemajuan pada partisipasi perempuan dalam angkatan kerja ini, dibandingkan dengan negara lain Arab Saudi masih cukup tertinggal. Sehingga Pangeran Mohammed bin Salman menargetkan untuk meningkatkan angka partisipasi tersebut hingga ke angka 30% dalam Saudi Vision 2030 ini. Selain dukungan dalam bentuk pelonggaran peraturan dan perubahan kebijakan, Arab Saudi juga sempat menyelenggarakan forum bisnis perempuan untuk pertama kalinya di tahun 2018 yang disponsori oleh Saudi Aramco, perusahaan minyak milik Arab Saudi. Acara tersebut dihadiri secara antusias oleh perempuan Arab Saudi terutama perempuan yang baru dan akan lulus tetapi masih kesulitan mendapatkan pekerjaan. Sampai dengan tahun 2018 ini, perempuan masih berkontribusi sebanyak 22% dalam ranah kerja Arab Saudi (CNBC Indonesia, 2018).

Tujuan ketiga dan terakhir adalah adalah *an ambitious nation* yang bertujuan membangun pemerintah Arab Saudi yang efektif, transparan, dan bertanggung jawab. Berikut dua poin utama dalam tujuan ini;

1. *An ambitious nation effectively governed*, berusaha meningkatkan pendapatan pemerintah non-migas mencapai SAR 1 triliun, meningkatkan posisi Arab Saudi dalam *Government Effectiveness Index* ke peringkat 20, dan meningkatkan posisi negara dalam *E-Government Survey Index* yang pada saat ini masih di peringkat 36 dan diharapkan dapat mencapai 5 besar.
2. *An ambitious nation responsibly enabled*, bertujuan untuk meningkatkan tabungan rumah tangga menjadi 10% dari total pendapatan rumah tangga, meningkatkan kontribusi sektor non-profit

terhadap PDB menjadi 5%, dan mengumpulkan 1 juta sukarelawan per tahun.

Pemerintah Arab Saudi memiliki target untuk mencapai standar yang tinggi dalam membangun pemerintah yang transparan dan bertanggung jawab. Untuk mencapai hal tersebut, pemerintah juga berkomitmen untuk mengatur keuangan negara secara efektif dan efisien. Sehingga, sudah tidak ada toleransi bagi individu yang melakukan korupsi dan hal tersebut dianggap pelanggaran yang sangat berat. Semua tujuan, rencana, dan indikator kerja pemerintah akan diterbitkan dan diberikan secara transparan sehingga progress dari pemerintah dapat terlihat secara publik. Transparansi akan ditingkatkan juga dengan memperluas layanan online dan meningkatkan standar tata kelola pemerintahan, dengan harapan hal tersebut juga dapat mendorong Arab Saudi menjadi pemimpin global dalam *e-government*.

Selain itu pemerintah juga akan memastikan pekerja dalam sektor publik telah terlatih dan memenuhi standar. Seluruh kementerian dan lembaga pemerintah akan diminta untuk menggunakan atau mengaplikasikan praktik terbaik dalam pengembangan sumber daya manusia dan akan merekrut individu berprestasi serta berupaya untuk membangun basis bakat yang kuat sehingga nantinya dapat menjadi pemimpin di masa yang akan datang.

Sejak tahun 2016, Saudi Vision 2030 telah memberikan beberapa perubahan setiap tahunnya yang dijelaskan secara terperinci oleh situs Al Arabiya. Perubahan-perubahan tersebut tidak hanya ada pada sektor industri dan ekonomi, tetapi juga pada hal-hal lain yang ingin ‘diperbaiki’ oleh Pangeran Mohammed bin Salman seperti sektor hiburan dan juga pada kebijakan terkait penduduk perempuan di Arab Saudi. Pada tahun 2016, diperkenalkan program nasionalisasi baru yang lebih sering disebut ‘*Saudization*’, dimana perusahaan-perusahaan wajib merekrut warga Negara Arab Saudi dalam berbagai sektor. Kemudian *Capital Market Authority* (CMA), yang merupakan penggerak pasar Arab Saudi, membuka peluang bagi investor asing untuk membeli instrument utang untuk menarik dana asing ke pasar Arab Saudi dan mengesahkan beberapa peraturan yang memungkinkan investor asing memiliki hak penuh terhadap bisnis mereka. Di tahun 2017, Pangeran

Mohammed bin Salman menyampaikan ‘janjinya’ untuk mengembalikan Arab Saudi ke bentuk “Islam moderat” dan akan mengubah negara mereka menjadi negara yang memiliki masyarakat yang lebih terbuka. Adanya perubahan dan pergeseran Arab Saudi kembali menjadi negara Islam moderat ini dapat diartikan sebagai salah satu cara untuk menarik investor asing sesuai dengan Saudi Vision 2030. Di tahun ini juga, pemerintah Arab Saudi menarik pelarangan pemutaran film bioskop yang telah diberlakukan selama 35 tahun dan memulai kerjasama salah satunya dengan sinema VOX, sebagai bentuk usaha pencapaian salah satu tujuan Saudi Vision 2030 yaitu mengembangkan sektor hiburan Arab Saudi. Kemudian tahun 2018, salah satu perkembangan yang paling signifikan adalah diperbolehkannya perempuan untuk mengendarai kendaraan sendiri di Arab Saudi dan penghapusan larangan tersebut secara resmi. Hal ini juga yang sempat membuat dunia internasional gempar. Selain itu, pemerintah juga memperkenalkan program *value-added tax* (VAT) dan mencabut program subsidi selama puluhan tahun untuk bahan bakar. Dan pada tahun 2019, banyak muncul perubahan-perubahan lainnya, terutama pada kebijakan dan pajak Arab Saudi. Salah satu hal yang cukup berdampak pada sektor pariwisata Arab Saudi adalah diberlakukannya *e-visa* kepada warga negara asing dari 49 negara lain untuk pertama kalinya. Setelah diberlakukannya visa tersebut, Arab Saudi menerima 24.000 pengunjung dalam 10 hari.

Saudi Vision 2030 juga menjelaskan bagaimana rencana besar Pangeran Mohammed bin Salman ini dapat dicapai pada tahun 2030. Dimulai dengan mengatur pemerintahan Arab Saudi dan menyelaraskan sistem mereka dengan prioritas nasional. Pemerintah Arab Saudi yang sebelumnya terbatas akan mengalami beberapa penyesuaian salah satunya dibentuknya Dewan Urusan Politik dan Keamanan serta Dewan Urusan Ekonomi dan Pembangunan yang nantinya juga akan membantu mempercepat pengembangan strategi, pengambilan keputusan, meningkatkan kinerja dan memantau pelaksanaan Saudi Vision 2030. Kemudian akan dibentuk komite yang akan meninjau terkait pengeluaran Arab Saudi yang akan bekerjasama dengan Dewan Urusan Ekonomi dan Pembangunan sehingga akan terukur dampak ekonomi yang diberikan pada negara sebelum

ditentukannya sebuah keputusan. Selama setahun terakhir, Arab Saudi telah meninjau kembali banyak undang-undang yang telah berlaku untuk memastikan bahwa undang-undang tersebut sejalan dengan prioritas Arab Saudi pada saat ini, mulai dari undang-undang perusahaan sampai dengan organisasi non-pemerintah.

Saudi Vision 2030 merepresentasikan kerangka strategis untuk transformasi dan keberlangsungan Arab Saudi secara berkelanjutan, dimana terdapat 3 pilar utama; *a vibrant society, a thriving economy, dan an ambitious nation*. Selain itu, Saudi Vision 2030 juga telah merencanakan pembangunan proyek-proyek besar dalam sektor pariwisata. Beberapa diantara proyek besar yang sedang dalam tahap pembangunan merupakan pembangunan tempat wisata yang disebut ‘Qiddiya’ dan juga Red Sea Project. Selain sebagai tempat wisata bagi turis dan masyarakat lokal, kedua rencana tersebut juga menjadi salah satu strategi Arab Saudi untuk menunjukkan kebudayaan dan kekayaan yang dimiliki oleh negaranya. Sehingga pembangunan tersebut sangat diperhatikan dan direncanakan sedemikian rupa agar mencapai tujuan awal dari pembangunan tersebut dan juga dapat menjadi pembangunan berkelanjutan untuk kedepannya, seperti ekspansi.

Anak perusahaan yang dimiliki oleh Pangeran Mohammed bin Salman, Qiddiya Investment Company (QIC), telah meluncurkan rencana ‘Kota Hiburan’ ini yang terletak 45 km dari ibukota Riyadh (Construction Week, 2019). Pembangunan Qiddiya ini merupakan salah satu rencana besar dalam mewujudkan serangkaian visi dalam Saudi Vision 2030. Terdapat dua tujuan ekonomi dan sosial dari pembangunan Qiddiya ini; untuk memajukan diversifikasi ekonomi dan membuka jalur profesional baru dengan memperkaya kehidupan kaum muda di Arab Saudi. Dalam web resmi Qiddiya dijelaskan bahwa pembangunan ini merupakan bagian penting dalam perubahan besar yang sedang terjadi di Arab Saudi dimana pembangunan ini menjadi katalisator dalam transformasi nasional, membuka kehidupan baru bagi masyarakatnya, dan memacu inovasi dalam beberapa sektor salah satunya hiburan. Selain membuka peluang lapangan kerja bagi masyarakatnya, Qiddiya juga diharapkan dapat meningkatkan peluang investor asing dan adanya kerjasama dengan negara lain terutama negara barat dalam pembangunannya.



### 2.3 Kebijakan Pangeran Mohammed bin Salman

Pada 14 Oktober 2020 kemarin, diadakan pembahasan antara perwakilan Arab Saudi dan Duta Besar Amerika Serikat secara daring terkait kemajuan yang telah dicapai oleh Arab Saudi. John Abizaid, Duta Besar Amerika Serikat di Arab Saudi, mengatakan bahwa Amerika Serikat sangat tertarik untuk menjadi ‘mitra’ Arab Saudi yang pada saat ini telah mendiversifikasi ekonomi, mendorong partisipasi perempuan dalam ekonomi, dan beberapa hal lainnya (Arab News, 2020). Hubungan antara kedua negara ini telah dimulai sejak awal direncanakannya Saudi Vision 2030 ini, sesuai dengan target yang ingin dicapai Pangeran Mohammed bin Salman untuk memperluas koneksi Arab Saudi dengan negara-negara lain terutama negara barat. Pembangunan Qiddiya, yang merupakan salah satu proyek besar dalam Saudi Vision 2030, melibatkan Bjarke Ingels Group (BIG) yang merupakan desainer dan arsitek yang berbasis di New York. Arab Saudi bekerja sama dengan Bjarke Ingels Group ini dalam menciptakan *Master Plan Qiddiya* yang telah dikembangkan dan merencanakan dibukannya Qiddiya pada 2023.

Bjarke Ingels Group atau BIG ini menawarkan pembangunan besar pada Qiddiya. Melalui Qiddiya Investment Company, dijelaskan bahwa proyek tersebut akan menjadi ‘*capital of entertainment, sports and the arts*’. Qiddiya ini akan dibangun pada 334 kilometer persegi dan akan menjadi salah satu pembangunan berkelanjutan yang akan membantu Arab Saudi mengamankan pertumbuhan serta perekonomian multi-sektor nantinya. Dalam rencana pembangunan tersebut, dijelaskan bahwa nantinya Qiddiya akan memiliki 6 wilayah dengan tema berbeda, salah satunya Arab Saudi akan membangun sirkuit atau lintasan balap baru yang diperkirakan akan mempersiapkan Arab Saudi sebagai tuan rumah Formula 1 dimulai dari tahun 2023. Kemudian Qiddiya juga akan membangun wilayah yang dikhususkan untuk hiburan dan atraksi olahraga yang menggunakan air dan juga ‘*eco zone*’ sebagai tempat yang dirancang untuk memperlihatkan keindahan alam dan satwa liar hingga lapangan golf yang akan diperkirakan akan dibuka untuk umum pada tahun 2022 mendatang (Design Boom, 2019).

Selain itu, Qiddiya juga akan menjadi pusat taman hiburan dengan bekerja sama dengan Six Flags Entertainment Corporation yang memang berfokus pada bidang taman hiburan. Six Flags Entertainment Corporation, yang merupakan sebuah perusahaan taman hiburan di Amerika Serikat, telah mengonfirmasi akan dibukanya Six Flags Qiddiya (Arab Saudi) pada 2023 mendatang. Pada tahun 2016 lalu, perusahaan ini telah menyatakan rencananya yang ingin melakukan ekspansi ke negara diluar Amerika Serikat dan telah mengincar beberapa negara, salah satunya Arab Saudi. Dan pada Februari 2017, *Public Investment Fund* (PIF)<sup>2</sup> Arab Saudi tertarik dan mencapai kesepakatan dengan Six Flags yang nantinya akan menjadi bagian dari Qiddiya. Kesepakatan ini juga dibuat oleh pihak PIF untuk mencapai tujuan dalam Saudi Vision 2030 dan sektor hiburan berperan penting dalam transformasi ekonomi Arab Saudi. Beberapa peraturan terkait sektor hiburan juga telah dilonggarkan untuk menghilangkan ketergantungan minyak Arab Saudi dan juga meningkatkan angka pengeluaran rumah tangga untuk rekreasi menjadi 6% (CLAD News, 2018). Dalam konferensi pers terkait Six Flags Qiddiya ini, David McKillips mengungkapkan rencana awal pembangunan taman hiburan tersebut sebagai Presiden Six Flags International. Meskipun Six Flags merupakan perusahaan taman hiburan berbasis budaya Amerika Serikat, tetapi untuk Six Flags Qiddiya ini akan dibangun tempat rekreasi yang terinspirasi oleh warisan dan budaya Arab Saudi. Selain pendapatan ekonomi Arab Saudi diperkirakan akan meningkat, Six Flags Qiddiya juga akan membuka kurang lebih 17.000 pekerjaan baru yang dapat ikut mengurangi angka pengangguran di Arab Saudi (Arab News, 2019). Dalam situs resminya, dijelaskan bahwa Six Flags Qiddiya ini akan memiliki sejumlah *roller coaster* yang dapat memecahkan rekor dan memberikan pengalaman mendebarkan yang unik. Taman hiburan ini juga akan mencakup 28 wahana yang juga termasuk wilayah hiburan Qiddiya lainnya. Beberapa nama area yang nantinya akan dibangun pada Six Flags Qiddiya ini yaitu; *The Citadel*, *The City of Thrills*, *Discovery Springs*, *Steam Town*, *Twilight Gardens*, *Valley of Fortune*, dan *Grand Exposition*. Masing-masing area tersebut akan memiliki 2

---

<sup>2</sup> Public Investment Fund of Saudi Arabia atau Dana Investasi Publik Arab Saudi merupakan sebuah perusahaan yang didirikan untuk mengelola kekayaan kedaulatan negara dan memfasilitasi pengembangan ekonomi nasional Arab Saudi.

sampai dengan 3 wahana yang dapat dinikmati sebagai hiburan layaknya taman hiburan yang berada di negara barat.

Dalam proyek besar ini, Philippe Gas diangkat sebagai CEO dari Qiddiya Investment Company menggantikan Michael Reininger yang akan tetap mengawasi dan memberikan arahan sebelum meninggalkan Qiddiya Investment Company setelah hampir mengabdikan selama tiga tahun dan mengawasi proyek besar tersebut. Philippe Gas sendiri sebelumnya merupakan Presiden Euro Disney dan telah bekerja bersama Perusahaan Walt Disney, yang merupakan perusahaan hiburan besar, selama 30 tahun. Tanggung jawab jabatan ini diberikan oleh Pangeran Mohammed bin Salman dan juga Dewan Direksi Qiddiya pada 29 November 2020 (Blooloop, 2020).

Kemudian Saudi Vision 2030 juga memiliki proyek besar dalam pembangunan sektor hiburan; Red Sea Project. Proyek ini diluncurkan pada 31 Juli 2017 oleh Pangeran Mohammed bin Salman dan merupakan suatu proyek pengembangan pariwisata yang mencakup kepulauan serta padang pasir yang luas serta pemandangan yang 'dramatis'. Proyek besar ini juga berada dibawah pengawasan PIF bersama dengan Qiddiya. Dalam website resmi mereka, dijelaskan mengenai pembangunan proyek yang bukan hanya sekedar tempat pariwisata, tetapi Red Sea Project ini juga memiliki komitmen untuk menunjukkan kekayaan budaya penting di Arab Saudi, melindungi dan melestarikan lingkungan lokal, dan menetapkan standar baru dalam pembangunan berkelanjutan. Proyek ini dipimpin oleh The Red Sea Development Company (TRSDC) yang memiliki komitmen untuk mengembangkan kawasan tersebut menjadi destinasi wisata dengan menonjolkan kekayaan budaya Arab Saudi yang akan dihargai oleh masyarakat internasional dan penduduk lokal. Segala bentuk komitmen dan rencana mereka telah tercantum secara jelas dalam website Red Sea Project. Selain itu, proyek ini juga akan mengikuti standar internasional baru dalam pembangunan berkelanjutan baik dalam perencanaan hingga konstruksi untuk mencapai hasil yang terbaik. Bahkan proyek ini diharapkan dapat menetapkan standar baru dalam pembangunan berkelanjutan yang melindungi lingkungan dan alam, menciptakan peluang bagi masyarakat lokal, dan menciptakan tujuan jangka panjang.

Sebelum pembangunan proyek-proyek besar pariwisata ini, Arab Saudi telah bekerjasama dengan Hyatt Hotels yang merupakan salah satu perusahaan perhotelan multinasional Amerika Serikat yang berpusat di Chicago. Perusahaan ini merupakan salah satu perusahaan terkemuka dalam perhotelan global dan telah bekerjasama dengan kurang lebih 30 negara. Pada 2017 lalu, Hyatt Hotels mengumumkan bentuk kerjasama mereka dengan membuka Hyatt Regenci Riyadh Olaya di Arab Saudi. Hotel-hotel ini telah ada untuk menampung pendatang asing yang datang ke Arab Saudi untuk ibadah haji dan umroh dan pembangunan hotel ini akan terus berkembang dengan proyek-proyek besar Saudi Vision 2030 dalam sektor pariwisata yang tentunya akan membutuhkan perhotelan dalam proyek tersebut (Business Wire, 2017).

Pada 2019 lalu, Pangeran Mohammed bin Salman juga sempat mengundang secara resmi *boyband* yang berasal dari Korea Selatan untuk melakukan konser di negaranya. Hal tersebut cukup menarik dunia internasional yang menganggap bahwa Arab Saudi mulai melonggarkan peraturan negaranya, khususnya dalam sektor hiburan. Tentunya hal ini juga mendapat kritik dari beberapa pihak tetapi justru sangat menarik bagi masyarakat Arab Saudi. Tiket konser yang dilaksanakan pada Stadium Internasional King Fahd dengan kapasitas 70.000 penonton ini terjual habis dan mendapat tanggapan positif dari masyarakat Arab Saudi yang telah lama tidak mendapatkan hiburan seperti konser di negara mereka, terutama konser *boyband* yang berasal dari Korea Selatan (BBC, 2019). Selain konser, dibukanya bioskop juga menjadi salah satu tempat investor untuk bekerjasama dengan Arab Saudi. Setelah 35 tahun, pelarangan adanya bioskop ini dapat diangkat oleh Pangeran Mohammed bin Salman yang berhasil mengundang perusahaan bioskop milik Amerika Serikat untuk menjadi salah satu investor Arab Saudi (BBC News, 2018). Adanya keputusan-keputusan ini merupakan langkah berani yang diambil oleh Pangeran Mohammed bin Salman. Meskipun terlihat sangat bertolak belakang dengan negaranya, ternyata beberapa perubahan dan keterbukaan ini justru memberikan peluang bagi Arab Saudi untuk maju dan mengikuti perkembangan dunia internasional.

Tidak hanya negara barat, Arab Saudi juga berusaha untuk memperkuat hubungan kerjasama negaranya dengan negara lain tanpa melihat kesamaan latar belakang negara tersebut tetapi dengan mempertimbangkan keuntungan yang akan diterima dari kerjasama tersebut. Salah satunya ketika Raja Salman mengunjungi negara-negara di Asia dengan tujuan menarik investor Asia ke Arab Saudi dan juga mengatur bisnis mereka dengan Tiongkok yang pada saat itu merupakan negara pengimpor minyak terbesar (BBC Business, 2017). Kunjungan tersebut diawali dengan beberapa negara, termasuk Indonesia, sebelum akhirnya Raja Salman berkunjung ke Tiongkok sebelum kembali ke negaranya. Sebelum berkunjung ke Tiongkok, Arab Saudi juga sempat membuat kesepakatan dengan Indonesia. Dalam kunjungannya ke Indonesia, disepakati kerjasama antara kedua negara tersebut dalam investasi Saudi Aramco sebesar \$6 miliar atau setara dengan 80 triliun rupiah. Meskipun jumlah tersebut tidak sedikit, dibandingkan dengan jumlah investasi dalam kesepakatan antara Arab Saudi dengan Tiongkok sangat jauh bedanya, dimana Tiongkok dan Arab Saudi menyepakati investasi Saudi Aramco hingga 870 triliun rupiah (BBC, 2017). Hal tersebut menandakan bahwa Raja Salman membuat suatu keputusan berdasarkan perhitungan dalam keuntungan yang akan didapatkan Arab Saudi, terlepas dari Tiongkok yang diduga melakukan penganiayaan Muslim Uighur di negaranya. Bahkan, pada kunjungan Pangeran Mohammed bin Salman di tahun 2019 lalu, ia menyatakan bahwa ia ‘mendukung’ adanya *concentration camps* bagi Muslim Uighur dan mengatakan bahwa hal tersebut merupakan ‘hak’ dari suatu negara untuk menjaga keamanan nasional negara tersebut dari terorisme (The News, 2019).

Meskipun Tiongkok merupakan salah satu negara yang berpotensi membantu perekonomian Arab Saudi terutama dalam perdagangan minyak, Amerika Serikat dan negara barat lainnya masih menjadi negara yang lebih menguntungkan bagi Arab Saudi dalam hal kerjasama. Hubungan antara Arab Saudi dan Tiongkok ini dapat dikatakan “*functional, but not strategic*” dan juga dianggap lebih simbolik daripada ‘substansial’ (Brookings, 2020).

Dalam mengelilingi negara-negara di Asia, Raja Salman juga sempat mengunjungi Jepang yang berharap dapat memperluas hubungan dengan Arab Saudi dan membantu negara tersebut untuk mendiversifikasi perekonomian

mereka. Arab Saudi sendiri juga ingin meningkatkan investasi Jepang pada sektor non-energi salah satunya manufaktur. Dalam kunjungan tersebut Arab Saudi juga sempat mendiskusikan strategi perkembangan Arab Saudi dan juga terkait Saudi Vision 2030 (Arab News, 2017).

Selain memperkuat hubungan luar negeri, Pangeran Mohammed bin Salman juga menciptakan kebijakan-kebijakan dalam Arab Saudi salah satunya terkait dengan kesetaraan gender dimana perempuan diperbolehkan melakukan hal-hal yang sebelumnya dilarang. Salah satu dari kebijakan tersebut adalah diangkatnya larangan perempuan untuk menyetir yang juga merupakan salah satu strategi dimana hal tersebut mungkin akan meningkatkan partisipasi perempuan untuk bergabung dalam angkatan kerja dan merevitalisasi ekonomi negara, hal ini juga dijelaskan dalam salah satu tujuan Saudi Vision 2030 yaitu meningkatkan partisipasi perempuan yang bekerja hingga 30% pada tahun 2030. Tidak hanya itu, larangan perempuan untuk menyetir ini sudah ada sejak lama di Arab Saudi, sehingga menghilangkan peraturan tersebut dapat mengangkat nama Pangeran Mohammed bin Salman baik di Arab Saudi maupun di dunia internasional sebagai pemimpin negara yang akan menciptakan suatu 'perubahan' pada negaranya. Menggunakan kesetaraan gender dan masalah hak-hak perempuan ini juga dapat menjadi 'alat' bagi Pangeran Mohammed bin Salman untuk memenangkan pikiran pemuda Arab Saudi dan mendapat dukungan dari masyarakatnya (Al Jazeera). Kemudian beberapa tempat umum seperti restoran juga telah menghilangkan pemisah, baik pintum masuk maupun tempat duduk, antara laki-laki dan perempuan. Selain mendapatkan dukungan dan perhatian dari masyarakat Arab Saudi, Pangeran Mohammed bin Salman juga mendapatkan dukungan dari negara-negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, salah satunya dukungan dari Presiden Donald Trump pada saat kunjungannya ke Amerika Serikat.

Adanya hal baru yang dibawa oleh Pangeran Mohammed bin Salman pada Arab Saudi memberikan beberapa kemajuan, salah satunya pada sektor ekonomi. Dalam *A Thriving Economy*, yang merupakan salah satu pilar dalam Saudi Vision 2030, dipaparkan rencana Arab Saudi dalam memajukan perekonomian. Sampai

dengan saat ini, perlahan-lahan Arab Saudi mulai memberikan perubahan. Sesuai dengan rencana besar tersebut, Arab Saudi berusaha mengurangi angka pengangguran. Pangeran Mohammed bin Salman juga menunjukkan bahwa 64% dari total angka pengangguran di Arab Saudi adalah perempuan (Arabian Business, 2020). Hal tersebut timbul akibat partisipasi perempuan pada ranah kerja masih sangat dibatasi. Sehingga penting untuk menciptakan perubahan kebijakan yang kemudian dapat meningkatkan partisipasi perempuan dalam ranah kerja untuk mengurangi angka tersebut. Selain itu, perekonomian Arab Saudi sudah lama bergantung pada minyak yang ternyata tidak selalu mengalami kenaikan ataupun memperoleh keuntungan. Apabila Arab Saudi tidak meningkatkan angka pendapatan non minyak dan tetap pada tingkat pendapat yang sama pada tahun 2015, yaitu sekitar SR100 milyar, maka Arab Saudi harus mengurangi beberapa pengeluaran lain seperti gaji karyawan pada sektor publik, membatalkan tunjangan dan bonus karyawan, sampai dengan memberhentikan pengoperasian dan pemeliharaan aset negara. Maka dari itu, Saudi Vision 2030 telah dirancang sedemikian rupa untuk menghindari kemunduran Arab Saudi sebagai negara maju dalam jangka waktu yang panjang bahkan dapat memajukan negara tersebut dan mempertahankan *power* negara mereka untuk jangka waktu yang lama.